

**IMPLIKASI PERATURAN KAWASAN BEBAS PERDAGANGAN
DAN PELABUHAN BEBAS PADA BISNIS PERMINYAKAN DI
PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN**

TESIS

Oleh

**SUKSES SIMANJUNTAK
1902190804**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022**

**IMPLIKASI PERATURAN KAWASAN BEBAS PERDAGANGAN
DAN PELABUHAN BEBAS PADA BISNIS PERMINYAKAN DI
PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.) Pada Program Studi Hukum Program Magister Program
Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia**

Oleh

**SUKSES SIMANJUNTAK
1902190804**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sukses Simanjuntak

NIM : 1902190804

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang ber judul "**Implikasi Peraturan Kawasan Bebas Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Pada Bisnis Perminyakan Di Pulau Bintan Dan Pulau Karimun**" adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 01 Desember 2022



(Sukses Simanjuntak)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

IMPLIKASI PERATURAN KAWASAN BEBAS PERDAGANGAN DAN
PELABUHAN BEBAS PADA BISNIS PERMINYAKAN DI PULAU
BINTAN DAN PULAU KARIMUN

Oleh:

Nama : Sukses Simanjuntak
NIM : 1902190804
Program : Magister
Studi : Hukum
Konsentrasi : Ekonomi

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan guna mencapai gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister, Universitas Kristen Indonesia

Jakarta, 01 Desember 2022

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Bernard Nainggolan SH. MH.
MBA

NIDN/NIDK:141103/990 3002 872

Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H.,M.H.,

NIDN/NIDK:091692/032 7096 504

Universitas Kristen Indonesia
Program Studi Hukum Magister
Ketua

Dr. Wijayak Sariwidjati, S.H, M.H.

Universitas Kristen Indonesia
Program Pasa Sarjana
Direktur,

Prof. Dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA.



**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 01 Desember 2022 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi Sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Sukses Simanjuntak
NIM : 1902190804
Program : Magister
Studi : Hukum
Konsentrasi : Ekonomi

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “ Implikasi Peraturan Kawasan Bebas Perdagangan dan Pelabuhan Bebas pada Bisnis Pertambangan di Pulau Bintan dan Pulau Karimun”, oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji:

1. Dr. Bernard Nainggolan SH. MH.

Jabatan
Dalam Penguji:
Sebagai Ketua

Tanda tangan:

2. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.

Sebagai Anggota

3. Dr. Wiwik Sri Widiyarti S.H., M.H.

Sebagai Anggota

Jakarta, 01. Desember 2022



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sukses Simanjuntak

NIM : 1902190804

Fakultas : Program Pascasarjana

Program Studi : Magister Hukum

Jenis Tugas Akhir : Tesis

Judul : **Implikasi Peraturan Kawasan Bebas Perdagangan dan Pelabuhan
Bebas Pada Bisnis Perminyakan Di Pulau Bintan Dan Pulau
Karimun.**

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugak akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundungan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta
Pada Tanggal 01 Desember 2022
Yang menyatakan



Sukses Simanjuntak

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yesus, atas karuniaNya, bahwa Tesis saya yang berjudul "**Implikasi Peraturan Kawasan Bebas Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Pada Bisnis Perminyakan Di Pulau Bintan Dan Pulau Karimun**", dapat diselesaikan dengan dengan waktu yang cukup lama. Adapun judul ini dipilih berdasarkan pengalaman penulis dalam menghadapi permasalahan implementasi peraturan Kawasan Bebas Perdagangan dan Pelabuhan Bebas di Terminal BBM dan LPG Pulau Bintan dan informasi dari PT. Oiltanking Karimun. Pada dasarnya penerbitan peraturan Kawasan Bebas Perdagangan dan Pelabuhan Bebas di Pulau Bintan dan Pulau Karimun bertujuan untuk pengembangan daerah, namun kenyataannya khusus pada bisnis perminyakan peraturan ini mengakibatkan timbulnya beberapa permasalahan antara lain kesulitan pembayaran kewajiban yang menganggu kelancaran distribusi BBM dan LPG. Kemudian berdirinya perusahaan PT. Oiltanking Karimun secara konsep diharapkan dapat menjadi tempat penyimpanan minyak stok nasional dan tempat penyimpanan minyak yang akan di impor ke Indonesia, namun karena permasalahan yang timbul dalam implementasi peraturan Kawasan Bebas Perdagangan dan Pelabuhan Bebas maka bisnis PT Oiltanking Karimun tidak sesuai dengan harapan pengusaha dan pemerintah.

Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif didukung pendekatan kualitatif. Dari analisa implikasi peraturan Kawasan Bebas Perdagangan dan Pelabuhan Bebas di Pulau Bintan dan Pulau Karimun, khususnya pada bisnis perminyakan bahwa implementasinya tidak memberikan nilai keadilan, tidak memberikan manfaat bagi PT. Pertamina (Persero) dimana implementasi peraturan ini menyebabkan terganggunya kelancaran distribusi BBM dan LPG dan menimbulkan kerugian pajak, serta bagi Perusahaan PT Oiltanking Karimun keberadaannya tidak bisa menjadi *buffer/penyangga* bagi stok BBM secara nasional.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

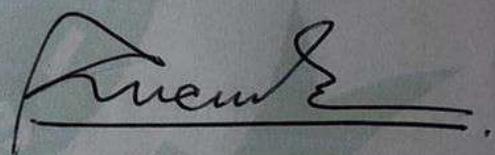
1. Isteri tercinta Ir. Enita R. Nainggolan M.H., dan anak-anakku tersayang Andre Sumanta Yesyurun S.T., Naomi Miryam S.M., dan Willyam Christian yang tetap memberikan dorongan selama kuliah dan dalam penyelesaian tesis ini.

2. Bapak Dr. Bernard Nainggolan S.H., M.H. dan Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H.,M.H., MBA, selaku dosen pembimbing, yang telah membimbing dan mengarahkan penyelesaian tesis ini.
3. Ibu Prof. Dr.dr.Bernadetha Nadeak M.Pd.P.A., selaku Direktur Pascasarjana atas dukungannya untuk penyelesaian kuliah saya.
4. Ibu Dr. Wiwik Sri Widiyarti S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum, atas arahan dan dukungannya untuk penyelesaian tesis ini.
5. Bu Murti (pensiunan staf administrasi MIH), Bu Jessica dan Sdr.Egi, selaku Staf administrasi MIH UKI, yang telah mendukung dalam administrasi penyelesaian kuliah saya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan saran dan masukan untuk penyempurnaannya.

Jakarta, 01 Desember 2022

Penulis,



Sukses Simanjuntak/
NIM 1902190804

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
HALAMAN PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
TUGAS AKHIR	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Perumusan Masalah	10
1.3. Maksud Dan Tujuan Penelitian	10
1.4. Metode Penelitian	11
1.5. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1. Kerangka Teoritis	17
2.1.1. Teori Keadilan	17
2.1.1. Teori Kemanfaatan (<i>Utiliarisme</i>)	18
2.1.3. Teori Kesejahteraan	27
2.2. Kerangka Konseptual	29
2.2.1. Kawasan Ekonomi Khusus	31
2.2.2. Aturan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	39
BAB.III. IMPLIKASI PERATURAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS PADA BISNIS PERMINYAKAN DI PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN	57
3.1. Implikasi Peraturan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Di Pulau Batam, Pulau Bintan Dan Pulau Karimun	57
3.2. Implikasi Peraturan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Di Pulau Bintan.	64
3.3. Implikasi dan dampak Peraturan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Pulau Bintan Dalam Bisnis PT. Pertamina(Persero).	70
3.4. Implikasi Peraturan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Pulau Karimun.	81
3.5. Implikasi Peraturan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Dalam Bisnis PT. Oil Tanking Karimun.	88

3.6. Potensi Kerjasama PT. Pertamina dengan PT Oil Tanking Karimun.	93
 .BAB IV. ANALISA HUKUM ATAS PENERAPAN PERATURAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS DI PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN	
4.1. Analisa Hukum Pembentukan Ketentuan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Pulau Bintan dan Pulau Karimun.	101
4.2. Analisis Peraturan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Pulau Bintan Dan Pulau Karimun Permasalahan Implementasi dan Penyelesaiannya.	101
4.3. Analisa Hukum atas Peraturan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Bidang Perminyakan Hilir.	110
4.4. Analisa Implikasi Peraturan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Bidang Perminyakan Hilir sesuai Teori Hukum.	113
	116
 BAB V PENUTUP	121
5.1 Kesimpulan	121
5.2 Saran	121
 DAFTAR PUSTAKA	123

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1. Lokasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Pulau Batam, Bintan dan Karimun	60
Tabel 3.2.: Data Pertumbuhan Perekonomian Kabupaten Bintan dari Tahun 2010 s/d tahun 2020	68
Tabel 3.3: Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karimun (Persen), Tahun 2018-2020	84
Tabel 3.4: Nilai dan Perubahan Ekspor Menurut Sektor (Juta US\$ dan Persentase (%)	85



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1: Peta lokasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Pulau Bintan	65
Gambar 3.2: Lokasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Pulau Karimun	83



ABSTRAK

Kebijakan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi antara lain pembangunan infrastruktur daerah termasuk membuat kebijakan khusus di wilayah strategis. Pemerintah memfasilitasi pengembangan bisnis di Kepulauan Riau, yaitu Pulau Batam, Pulau Bintan dan Pulau Karimun menjadikannya menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), yaitu PP Nomor 46 Tahun 2007 untuk Pulau Batam, sebagian Pulau Bintan sesuai PP Nomor 47 Tahun 2007, dan sebagian Pulau Karimun sesuai PP Nomor 48 Tahun 2007. Sebagai KPBPB, di Pulau Bintan terdapat Terminal BBM dan LPG yang merupakan tempat penyimpanan stok Nasional BBM dan LPG Tanjung Uban, dimana sebagian besar BBM dan LPG merupakan konsinyasi. Kemudian PT. Oiltanking Karimun (PMA) di Pulau Karimun merupakan tanki penimbunan dengan harapan BBM impor yang selama ini dibeli oleh PT. Pertamina (Persero) dapat ditimbun disana. Aturan KPBPB memberikan kemudahan dalam pembayaran bea dan pajak atas masuk atau dikeluarkan dari Kawasan. Penerapan aturan menimbulkan permasalahan pada PT. Pertamina (Persero) yaitu menghambat operasi distribusi karena Pertamina (Persero) beroperasi 24 jam setiap harinya untuk mendistribusikan BBM dan LPG, tidak sejalan dengan waktu kerja bank dalam pembayaran kewajiban pajak atas barang yang mau dikeluarkan dari Kawasan, dimana pembayaran pajak harus diselesaikan terlebih dahulu baru kargo diijinkan keluar dari kawasan. Demikian juga dengan bisnis PT. Oiltanking Karimun, di Pulau Karimun pengembangan usahanya tidak bisa tercapai karena penerapan aturan kawasan bebas perdagangan disana.

Untuk memahami lebih mendalam permasalahan tersebut diatas maka dilakukan penelitian implikasi dan analisa hukum atas aturan Kawasan bebas perdagangan ini. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum normatif didukung penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa implikasi aturan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Pulau Bintan dan Pulau Karimun, mengganggu operasi perusahaan dan dinilai tidak memberikan nilai yang berarti, bahkan menimbulkan kerugian di pihak PT. Pertamina (Persero). Sehingga dari sisi teori hukum keadilan, bahwa peluang pengusaha diberikan secara terbuka, namun tidak memberikan manfaat bagi perusahaan bidang permifyakan bahkan menimbulkan kerugian bagi PT. Pertamina (Persero) di Pulau Bintan dan harapan PT. Oiltanking Karimun tidak terwujud, serta perubahan status KPBPB tidak membuka ruang pengembangan usaha untuk profit yang menimbulkan kebahagiaan bagi PT. Pertamina (Persero) dan PT. Oiltanking Karimun. Untuk itu disarankan dibuatkan aturan yang mendukung kelancaran dan pengembangan bisnis di Kawasan Perdagangan Bebas dan membentuk tim kajian untuk membuatkan kajian atas *cost and benefit* dan membuatkan strategi pengembangan usaha di kawasan perdagangan bebas.

Kata Kunci: Kawasan Perdagangan Bebas, kepabeanan, perpajakan

ABSTRACT

Government policies in the framework of increasing economic growth include regional infrastructure development including making special policies in strategic areas. The government facilitates business development in the Riau Archipelago, namely Batam Island, Bintan Island and Karimun Island, making it a Free Trade and Free Harbor Area (KPBPB), Free Trade Zone, namely PP No. 46 of 2007 for Batam Island, parts of Bintan Island according to PP No. 47 of 2007, and parts of the Karimun according to PP No. 48 of 2007. As a Free Trade Zone, on Bintan Island there is a BBM and LPG Terminal which is a buffer for the Tanjung Ubang National BBM and LPG stocks, where most of the BBM and LPG are consigned. Then PT. Karimun Oiltanking (PMA) on Karimun Island is a stockpiling tank in hopes of importing fuel which has been purchased by PT. Pertamina (Persero) can be stockpiled there. KPBPB rules provide convenience in paying duties and taxes upon entering or leaving the Area. However, the implicit for the business of PT. Pertamina (Persero) raises problems, namely hampering distribution operations because Pertamina (Persero) operates 24 hours a day to distribute BBM and LPG, not in line with bank working hours in paying tax obligations for goods to be released from the Area, where tax payments must be completed first, then the cargo leaves the area. Likewise with the business of PT. Oiltanking Karimun, on Karimun Island the development efforts could not be achieved due to the application of the free trade area rules there.

In order to understand more deeply the problems mentioned above, a research on the implications and legal analysis of the rules of this free trade area is carried out. The research was conducted using a normative legal approach supported by qualitative research. From the research results, it was found that the Free Trade Zone and Free Harbor regulations stated on Bintan Island and Karimun Island disrupted the company's operations and were considered not to provide significant value, and even caused losses on the part of PT. Pertamina (Persero). So that from the legal theory of justice, that the opportunities for entrepreneurs are given openly, but do not provide benefits for companies in the oil sector and even cause losses for PT. Pertamina (Persero) on Bintan Island and the hope of PT. Karimun Oiltanking did not materialize, and the change in Free Trade Zone status did not open space for business development for profit which made PT. Pertamina (Persero) and PT. Karimun oil tanking. For this reason, it is recommended to make regulations that support the smooth running and development of business in the Free Trade Zone. Free Trade Zone form a study team to conduct studies on costs and benefits and develop business development strategies in free trade zone.

Keywords: Free Trade Zone, customs, taxation